

**ANALISIS PRAKTEK ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) DI KANTOR PEMERINTAH KOTA DEPOK PADA
TAHUN 2019**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

**MUHAMMAD
I000150001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PRAKTEK ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) DI KANTOR PEMERINTAH KOTA DEPOK PADA
TAHUN 2019**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MUHAMMAD
I000150001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing


(Drs. Harun, M.H)
NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PRAKTEK ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS) DI KANTOR PEMERINTAH KOTA DEPOK PADA
TAHUN 2019**

OLEH

MUHAMMAD
I000150001

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 24 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Drs. Harun,M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Yayuli.S.Ag.MPI
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Imron Rosyadi,M.Ag
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Agustus 2021

Penulis

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'M' and a 'D' intertwined.

MUHAMMAD
I000150001

ANALISIS PRAKTEK ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR PEMERINTAH KOTA DEPOK PADA TAHUN 2019

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat penerapan dan hukum zakat profesi di Pemerintah Kota Depok. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan data yang digunakan adalah terbagi menjadi dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data primer merupakan perolehan peneliti yang dari website obyek penelitian atau dari dokumen tertulis lainnya sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui wawancara dengan petani. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi di Pemerintah Kota Depok dilakukan dengan cara pemotongan gaji secara sukarela atas kesepakatan dari pihak yang memiliki gaji, bekerja sama dengan bank Jabar Banten dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok, pemotongan tersebut senilai 2,5% dari pemotongan gaji. Terkait dengan tinjauan hukumnya bahwa mereka mengikuti dua pendapat ulama, ada yang mengikuti haul dan nishab, PNS yang mengikuti penerapan zakat dengan haul mereka akan mengeluarkan pada saat penerimaan gaji, untuk PNS yang mengeluarkan berdasarkan haul dikeluarkan pada saat genap dua belas bulan.

Kata Kunci : Praktek zakat Profesi, tinjauan hukum praktek zakat profesi

Abstract

The purpose of this research is to see the application and law of professional zakat in the Depok City Government. The method used in this study is descriptive qualitative approach, and the data used is divided into two sources of data, namely primary data and secondary data, primary data is obtained by researchers from the research object's website or from other documents while secondary or from other written the research object's website or from other written documents while secondary data in research this was obtained directly by researchers in the field through interviews with farmers. The results of the study show that the implementation of professional zakat in the Depok City Government is carried out by those who have salaries, in collaboration with bank Jabar Banten and the National Zakat Agency of Depok City, the deduction is 2,5% of the deductions. Wages. Related to the legal review that they follow two opinions of scholars, there are those who follow the haul and nishab, civil servants who follow zakat with their haul will issue it based on haul are issued when they are even twelve months old.

Keywords : professional zakat practice, review the law of professional zakat practice

1. PENDAHULUAN

Zakat profesi belum terkenal dalam ilmu fikih selama kurun 14 abad lamanya. Zakat profesi belum pernah dimuat di Al-Qur'an, hadist, fikih, begitupula dalam Undang-Undang No. 23

Tahun 2011 tidak dibahas istilah zakat profesi namun dinamakan dengan zakat penghasilan dan jasa. karena munculnya zakat profesi baru di era sekarang di kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk pada aparatur sipil negara (PNS) pada umumnya.

Pada di era modern, profesi masyarakat semakin berubah untuk memperoleh penghasilan. dengan demikian, golongan harta dikenai wajib diperluas pada dikembangkan pada beberapa bentuk harta kekayaan, sebagaimana pendapat imam Yusuf Al-Qardhawi, Hasbi Ash-Shiddiqie, dan intelektual serta ulama besar bagi umat Islam di era tersebut. Zakat profesi adalah zakat dari hasil profesi seseorang baik melalui pemikiran ataupun keterampilan dalam melakukan pekerjaan. Pembicaraan mengenai zakat profesi ini berupa pendapatan seorang dalam suatu pekerjaan yang biasa disebutkan dengan fee.

Zakat profesi belum terkenal dalam ilmu fikih selama kurun 14 abad lamanya. Zakat profesi belum pernah dimuat di Al-Qur'an, hadist, fikih, begitupula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tidak dibahas istilah zakat profesi namun dinamakan dengan zakat penghasilan dan jasa. karena munculnya zakat profesi baru di era sekarang di kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk pada aparatur sipil negara (PNS) pada umumnya.

Pada di era modern, profesi masyarakat semakin berubah untuk memperoleh penghasilan. dengan demikian, golongan harta dikenai wajib diperluas pada dikembangkan pada beberapa bentuk harta kekayaan, sebagaimana pendapat imam Yusuf Al-Qardhawi, Hasbi Ash-Shiddiqie, dan intelektual serta ulama besar bagi umat Islam di era tersebut. Zakat profesi adalah zakat dari hasil profesi seseorang baik melalui pemikiran ataupun keterampilan dalam melakukan pekerjaan. Pembicaraan mengenai zakat profesi ini berupa pendapatan seorang dalam suatu pekerjaan yang biasa disebutkan dengan fee.

Pemerintah Indonesia telah mengatur sistem manajemen zakat melalui KMP No. 581 Tahun 1999 mengenai melaksanakan UU (Undang-undang) nomor. 38 Tahun 1999 mengenai manajemen Zakat seperti dalam peratiran menteri Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 373 Tahun 2003 mengenai praktek Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan telah ditinjau kembali dengan alasan UUNomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan zakat dilihat tidak relevan dengan kebutuhan hukum di masyarakat, dengan demikian Negara meninjau untuk merancang Undang-Undang mengenai Zakat Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yang meliputi kegaitan, organisasian, perencanaan, dan distribusi dana zakat.

Berdasarkan tinjauan (BAZNAS) dengan kampus ITB pada Januari-April 2011, dengan data penduduk Indonesia yang besar dan mayoritas yaitu 87% penduduknya adalah muslim dengan mengasumsikan 20 % sebagai muzakki, hal ini akan memberikan sebuah potensi besar dikisarkan dengan angka 217 triliun. Namun pada kenyataannya, pada Tahun 2010 zakat yang berhasil dihimpun senilai 1,5 triliun, nilai ini mencapai angka 1% dari peluang pengeluaran zakat yang, data tersebut tidak mencakup bagi kaum muslim yang menyalurkan zakatnya secara perorangan.

Pemerintah Indonesia telah mengatur sistem manajemen zakat melalui KMP No. 581 Tahun 1999 mengenai melaksanakan UU (Undang-undang) nomor. 38 Tahun 1999 menegnai manajemen Zakat seperti dalam peratiran menteri Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 373 Tahun 2003 mengenai praktek Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan telah ditinjau kembali dengan alasan UUNomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan zakat dilihat tidak relevan dengan kebutuhan hukum di masyarakat, dengan demikian Negara meninjau untuk merancang Undang-Undang mengenai Zakat Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yang meliputi kegaitan, organisasian, perencanaan, dan distribusi dana zakat.

Berdasarkan tinjauan (BAZNAS) dengan kampus ITB pada Januari-April 2011, dengan data penduduk Indonesia yang besar dan mayoritas yaitu 87% penduduknya adalah muslim dengan mengasumsikan 20 % sebagai muzakki, hal ini akan memberikan sebuah potensi besar dikisarkan dengan angka 217 triliun. Namun pada kenyataannya, pada Tahun 2010 zakat yang berhasil dihimpun senilai 1,5 triliun, nilai ini mencapai angka 1% dari peluang pengeluaran zakat yang, data tersebut tidak mencakup bagi kaum muslim yang menyalurkan zakatnya secara perorangan.

2. METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala konseptual dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data diperoleh dari sumber langsung dengan mengikuti instrument pada penelitian yang disusun. Pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan penelitian yang temuan-temuannya tidak menggunakan langkah pendekatan statistic yang jalan perolehan data dengan angka-angka dan hitungan Akan tetapi penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan pengamatan, wawancara dan dokumentasi sehingga untuk dapat memperoleh data yang diteliti diharuskan untuk langsung mengamati studi kasus dilapangan.

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan agar mendeskriptifkan atau mengungkapkan fenomena yang ada. Baik fenomena yang terjadi berupa bersifat ilmiah ataupun rekayasa dari sumber data. Data yang diperoleh dari lapangan berupa kata-kata, gambar serta bukan berupa angka-angka. Maka pada laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terhadap penyajian laporan pada penelitian.

2.1 Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari para aparatus sipil negara yang berada di pemerintah kota depok, dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian

2.2 Metode Pengambilan Data

Pada suatu penelitian sering terjadi proses pengumpulan data, teknik pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data yang akan diperlukan. Dalam proses pengumpulan data akan menggunakan data atau lebih metode. Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data tentunya harus sesuai dengan karakter penelitian yang sedang dilakukan

2.2.1 Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa baik berupa perilaku manusia setempat atau fenomena alam yang terjadi.

2.2.2 Wawancara

Penyusunan menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara jenis ini pertanyaan yang akan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. Pada penelitian ini menggunakan wawancara untuk memperoleh langsung data yang terjadi dilapangan dengan menyiapkan pertanyaan yang akan dibutuhkan pada penelitian.

2.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu kejadian atau laporan yang ada. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen. Seperti dalam buku registrasi dan arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian serta mendokumentasikan hasil yang telah didapatkan dilapangan baik dengan tulisan atau dengan mengambil gambarnya.

2.3 Metode Analisis Data Penelitian

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data memilah-milah serta menjadikan satuan yang dapat dikelola mencari dan mengumpulkan data, serta menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan oleh orang lain. Analisis data terbagi menjadi dua jenis data yaitu pertama analisis diskriptif merupakan analisis dengan paparan data secara sistematis dan logis disetiap aspek yang diteliti. Kedua, analisis induktif, merupakan proses fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

2.4 Dasar Hukum Zakat Profesi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S. al- Baqarah, 2:267).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Nishab zakat profesi

Zakat penghasilan terbagi dengan berbagai pandangan ulama terhadap nishabnya dan cara menyalurkannya. Pertama, apabila disamakan dengan zakat petani, baik dalam nisabnya sebanyak 653 kg beras, kadarnya sebesar 5% dan akan dikeluarkannya di waktu memperoleh gaji dan penghasilan. Kedua adalah jika di samakan terhadap punyaluran zakat emas serta perdagangan, maka yang menjadi nisab sebesar 85 gram dan kadar yang dikeluarkan sebesar 2,5%, zakat tersebut disalurkan satu Tahun dalam satu kali pelaksanaan.

Pandangan Dr Yusuf Al-Qardhawi tentang metode hitungan di zakat profesi terdapat 2 bagian yaitu pertama Secara langsung, zakat akan dihitung dari 2,5%, berupa penghasilan kotor yang secara langsung, baik hal tersebut akan di dibayarkan secara bulanan ataupun tahunan. Dalam penggunaan metode ini sangat adil terhadap orang yang memiliki harta yang lebih. seperti: Seseorang berpenghasilan senilai 3.000.000 perbulannya, maka diwajibkan untuk

menyalurkan zakatnya senilai $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau $\text{Rp } 900.000$ per Tahun.

Setelah kebutuhan dipotong semuanya, maka yang wajib untuk dihitung zakatnya sebesar $2,5\%$ setelah dipotong oleh kebutuhan pokok dan gaji pokok. Metode tersebut lebih adil untuk diterapkan bagi mereka yang berpenghasilannya tidak terlalu tinggi. Seperti: Seseorang dengan penghasilan $\text{Rp } 1.500.000,-$ dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok $\text{Rp } 1.000.000$ tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau $\text{Rp } 150.000,-$ per Tahun.

3.2 Praktek Dan Hambatan Zakat Profesi Di Pemkot Depok

Hasil penelitian yang dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah Kota Depok, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok, Bank Jabar-Banten (BJB) Kantor Cabang Kota Depok, dan BAZNAS Kota Depok menunjukkan pelaksanaan atau realitas zakat profesi di Kota Depok dilakukan dengan cara pemotongan gaji secara sukarela, tidak ada sanksi khusus yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok yang enggan untuk membayar zakat dan atas kesepakatan Pemerintah Daerah Kota Depok, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok, Bank Jabar-Banten (BJB) Kantor Cabang Kota Depok, dan BAZNAS Kota Depok sejumlah $2,5\%$ dari gaji ASN.

Zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok dipungut dari pendapatan pokok yang kotor dari tiap pegawai dengan angka $2,5\%$, pihak yang melakukan pemotongan yaitu Pemda Kota Depok bekerjasama dengan Bank Jabar-Banten (BJB) Kantor Cabang Kota Depok berdasarkan dengan surat pernyataan yang disepakati. Jika seorang karyawan atau pegawai dalam upahnya tidak mencapai nishab zakat yaitu senilai 85 gram emas/Tahun maka tidak akan dilakukan pemotongan zakat profesi akan tetapi yang dikeluarkan sedekah atau infaq.

Adapun pemotongan zakat profesi senilai $2,5\%$ dari gaji efektif serta meringankan bagi lembaga BAZNAS di Kota Depok yaitu dengan dilakukan pembayaran zakat profesi autodebit, yaitu sistem pemotongan zakat dari gaji yang ditransfer ke rekening sipekerja dalam tiap bulannya, dengan ketentuan disetujui di awal pada saat menandatangani kesepakatan untuk jangka waktu setahun atau dua Tahun atau waktu tertentu. BAZNAS Kota Depok ini sebagai amil zakat membuat akad yang disepakati tersebut dengan ASN Kota Depok. Dengan metode pembayaran zakat profesi seperti ini, akan terus berjalan secara sistematis pada setiap perbulan

disesuaikan jangka kesepakatan tanpa diperhatikan kondisi tertentu untuk jangka waktu tersebut. Sehingga praktek zakat dilakukan untuk menunaikan kewajiban.

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, mengenai zakat penghasilan ditentukan umum pada fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah tiap penghasilan seperti gaji, honor, fee, jasa, dan lain-lain yang didapatkan dengan jalan yang halal, baik pendapat tersebut secara berrutin seperti PNS dan Karyawan swasta dan sejenisnya, serta perolehan yang didapatkan dari pekerjaan bebas lainnya. Maka berdasarkan fatwa ini gaji ASN Kota Depok adalah termasuk objek zakat penghasilan.

4. PUNUTUP

1. Adapun praktek zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) yang terdapat pemerintah kota Depok dengan penerapan dikeluarkan dengan cara pemotongan gaji pegawai secara sukarela dalam setiap bulannya, dengan bekerjasama antara bazanas Kota Depok dengan Bank BJB. untuk gaji yang dikeluarkan dihitung total gaji kotor dari pegawai di Pemkot Depok, dalam pandangan ulama penerapan zakat profesi dikeluarkan dihitung setelah pendapat bersih yaitu setelah dikurangi kebutuhan pokok. Terkait belum ada regulasi yang tegas untuk mengarah pada wajibnya penerapan zakat profesi di Pemerintah Kota Depok tersebut..
2. Dengan demikian rumus yang digunakan menetapkan gaji yang sudah memenuhi kewajiban zakat profesi setiap bulannya adalah 85 gr emas dikali harga emas dibagi 12 bulan setelah itu dikali 2,5%, hasilnya adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap bulannya mengikuti tanggal pembayaran gaji. Ditegaskan lagi gaji yang wajib dipotong 2,5 % untuk membayar zakat tersebut sudah sekaligus dipotong untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditinjau dari hukum Islam realitas zakat profesi di kota Depok tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, yaitu syarat sah diterimanya zakat, antara lain: Harus dimiliki secara penuh, bukan harta orang lain. Mencapai nishab dan haulnya, Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkan mengikuti waktu penggajian. Hartanya harus halal bukan dari sumber-sumber haram. Harga satu gram emas murni (24 karat. Emas dengan 24 karat dianggap sebagai emas murni atau kadar 99,9 persen) adalah Rp. 928.000. apabila dikalikan dengan 85 gram yang merupakan nishab zakat profesi adalah

Rp. 78.880.000 sebagai nishab zakat profesi yang dibayarkan perTahun (haul). Sehingga tidak semua ASN Kota Depok membayar zakat profesi, hanya ASN Kota Depok yang bergaji minimal Rp. 6.573.333,33 per-bulan yang dapat membayar zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanjeh .(2011) *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta. PT Teras
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Gunawan Imam (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Hertina. (2013). *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*. Pekanbaru: Suska Press
- Muhammad. (2002) *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah.
- Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (2014). Indonesia.
- Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (2019). Indonesia.
- Meleong Lexi. (2002) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Rosdakarya:
- Mualimah, S. (2015). *Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*. Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
- Tim Dakwatuna. (2011). Potensi Zakat Rp 217 Trilliun. Retrieved from www.dakwatuna.com/2011/08/07/13917/potensi-zakat-rp-217-trilliun/#axzz2fippEDsJ
- Syaodih Nana Sukmadinata. (2013) *Metode Pendekatan Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Qardawi, Y (2011). *Fiqh az-Zakat*. (S. H. Dkk, Ed.). Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa